

JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume IV, Nomor 02, November 2019 – April 2020

Konsep Produksi Menurut Tan Malaka Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Penulis : Zuwardi dan Hardiansyah Padli

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV, Nomor 02, November 2019 –
April 2020

Diterbitkan oleh: Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

Konsep Produksi Menurut Tan Malaka Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Zuwardi, Hardiansyah Padli

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Email: zuwardiyzi84@gmail.com

Email: hardiansyahpadli@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to depict Tan Malaka's socialist economic thought related to the issues on the production of concept. This is qualitative research using library research method to gather the data on Tan Malaka's thought on the concept of production. This study shows that the concept of the balance of production and consumption, the country's economic independence and the concept of labor costs in line with the concept of Islamic economics. While from the arrangement of land as a factor of production, Tan Malaka gradually wants to eliminate individual ownership of the means of production. This is not in line with Islamic economic concept where individual ownership of the means of production and production factors permitted as long as not contrary to Islamic law.

Keyword: Islamic Economic, Production, Tan Malaka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemikiran ekonomi sosialis Tan Malaka yang terkait dengan masalah produksi. Ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data pemikiran Tan Malaka tentang konsep produksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keseimbangan produksi dengan konsumsi, kemandirian ekonomi negara dan konsep upah tenaga kerja sejalan dengan konsep ekonomi Islam. Sedangkan dari penataan tanah sebagai faktor produksi, Tan Malaka secara bertahap ingin menghilangkan kepemilikan individu atas alat-alat produksi. Hal ini tidak sejalan dengan konsep ekonomi Islam dimana kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan faktor produksi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Produksi, Tan Malaka

PENDAHULUAN

Tan Malaka dilahirkan di kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 1897 M dan diberi nama Ibrahim. Adapun Masa kecilnya dilalui seperti layaknya anak-anak sebaya dengannya. Seperti kebanyakan anak laki-laki Minang pada saat itu, Ibrahim menghabiskan masa kecilnya belajar agama di surau, bermain bola, berenang di sungai dan belajar silat. Kendati berbadan kecil, Ibrahim terkenal pemberani dan sering berkelahi, sehingga ibunya sering mengadukan perbuatan Ibrahim tersebut kepada "guru gadang" (guru kepala). Atas aduan ibunya tersebut, guru gadang menjalankan hukuman pada dirinya, yang dikenal dengan "pilin pusek" (putar pusing) (Malaka, 2000a).

Sewaktu masih kecil Ibrahim telah mampu menjadi Guru Muda di kampungnya. Hal ini didukung oleh pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dalam satu waktu, sang Ibu tak jarang menceritakan kisah-kisah Nabi kepada Ibrahim ketika beliau masih kecil. Sementara itu, Ibrahim kecil mendengarkan dengan mata berkaca-kaca karena terharu mendengarkan

cerita Nabi Muhammad SAW (Malaka, 2000b). Memasuki usia dua belas sampai enam belas tahun (1908-1913) beliau sekolah di *Kweek School* (Sekolah Guru) Fort de Kock, Bukittinggi. Setelah menamatkan pendidikannya di Bukittinggi, Ibrahim pulang ke kampung halamannya dan dianugerahi gelar adat tertinggi yang juga sekaligus kepala suku kaumnya dengan gelar "Datuak Tan Malaka" (Nasbi, 2004).

Tan Malaka merupakan sosok anak yang cerdas, sehingga salah seorang gurunya yang bernama Mr. Horensma tertarik mengirim Tan Malaka untuk belajar sekolah guru di negeri Belanda. Bahkan kekurangan biaya sekolah Tan Malaka yang dikumpulkan secara bergotong royong oleh warga kampung ditutupi oleh Mr. Horensma sebagai bentuk pinjaman. Di Belanda Tan Malaka mulai akrab dengan karya-karya pemikir besar seperti; Nietzsche, Marx, Engels, Hegel, serta buku-buku Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika yang kemudian hari sangat berpengaruh terhadap pola pikir Tan Malaka. Ia sangat suka sekali berada di toko buku di sudut *Jakobijnestraat* (Jalan Jacobijn) untuk membeli buku atau sekedar melihat-lihat saja. Karena minat membacanya yang sangat besar tersebut, ia sering kali harus menghemat biaya makan agar dapat membeli buku (Poeze, 2000).

Tan Malaka bukan seorang lulusan dari bidang ilmu ekonomi seperti Bung Hatta. Beliau hanya lulusan sekolah guru yang tidak sampai mendapatkan ijazah guru kepala. Namun minatnya belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sangatlah tinggi, sehingga membuat dia belajar secara *otodidak* melalui buku-buku bacaan dan pengalaman hidupnya dari rantau ke rantau. Buku-buku yang nanti dijadikan oleh Tan Malaka sebagai alur berfikir dirinya.

Sebagaimana yang diungkap penulis di atas, adapun akar dari pengetahuan ekonomi Tan Malaka bersumber dari pemikiran Karl Marx dan pengikut marxis lainnya. Pemikiran ekonomi Tan Malaka yang kearah marxis ini selain didasarkan pada pembacaan beliau terhadap buku-buku kiri juga didasarkan oleh karena beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rakyat ditindas dan dijajah oleh kaum kapitalis imperialis Belanda. Penindasan tersebut menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Kemelaratan dan kemiskinan yang timbul di negaranya, menurut Tan Malaka karena kebodohan yang sengaja diciptakan oleh pemerintahan kapitalisme imperialisme Belanda. Sehingga rakyat Indonesia selalu merangkak dalam zaman kegelapan. Karena kebodohan ini, menurut Tan Malaka perbudakan dan kezaliman selalu merajalela. Tanah rakyat dibeli dengan harga yang sangat murah, bahkan kalau perlu dirampas dengan paksa. Rakyat dipaksa untuk menghasilkan produksi sesuai dengan keinginan penguasa. Pajak yang tinggi diminta kepada masyarakat miskin dan kontrak kerjapun dibuat menurut keinginan penguasa. Agar masyarakat ini selalu dalam kegelapan, merekapun diracuni dengan berbagai macam bentuk permainan seperti judi, candu (narkoba-pen.) ataupun pelacuran.

Oleh karena itu, Tan Malaka bercita-cita untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan menciptakan keadilan yang merata. Salah satu cara yang dianggap cukup ampuh untuk membebaskan rakyatnya dari penindasan dan kezaliman, menurut Tan Malaka adalah dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak dan sesuai dengan iklim dan budaya di Indonesia. Maka wajar kiranya pendidikan dianggap oleh Tan Malaka sebagai tugas yang suci dan mulia. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Tan Malaka adalah bagaimana membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, Tan Malaka mencoba untuk mengemukakan bahwa syarat agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera adalah dengan menciptakan sebuah keadilan, menghapuskan perbedaan dan melakukan sebuah perubahan besar terhadap ekonomi, politik dan sosial yang memperbaiki keadaan seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari hal di atas, penulis tertarik untuk membaca dan mengeksplorasi lebih dalam lagi pemikiran ekonomi Tan Malaka. Salah satu sub pemikiran ekonomi Tan Malaka adalah tentang konsep produksi. Setelah penulis mengeksplorasi konsep produksi menurut Tan Malaka, maka penulis mencoba menganalisis konsep produksi Tan Malaka dari pespektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang fokus dengan menelaah buku-buku, majalah, dan artikel yang berkaitan penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah tulisan Tan Malaka yang berhubungan dengan masalah-masalah Ekonomi yaitu: Rencana Ekonomi Berjuang, Massa Aksi, Menuju Republik Indonesia, Dari Penjara Ke Penjara jilid I, II, dan III dan Islam dalam tinjauan Madilog. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku lain yang ditulis oleh orang lain yang notabenehnya berisikan informasi tentang bahan primer guna mendukung penelitian ini.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). *Content Analysis is a technique for gathering and analyzing the content of text* (Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005: 167). Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis data serta memperhatikan text (isi) dari data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini analisis ditekankan pada beberapa pemikiran Tan Malaka pada konsep produksi kemudian dicermati perbedaan, kesesuaian serta keselarasannya menurut perspektif ekonomi Islam. Langkah selanjutnya adalah refleksi secara kritis sehingga diperoleh suatu pemahaman sistematis, integral, dan komprehensif tentang konsep produksi Tan Malaka dalam tinjauan Ekonomi Islam. Setelah dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara deskriptif dan komparatif sehingga memperoleh konklusi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Produksi Menurut Tan Malaka

Dalam satu waktu Tan Malaka pernah mengatakan bahwa syarat mutlak agar Indonesia menjadi negara yang maju adalah dengan terciptanya keseimbangan antara penghasilan (produksi) dengan yang dihasilkan (konsumsi) oleh kota dan desa. Dengan adanya keseimbangan tersebut, menurut beliau akan terjadi pertukaran yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

“Sebagaimana yang telah kita tunjukkan, kemajuan industri disetiap negeri sejajar dengan timbulnya kota-kota yang mengeluarkan terutama barang-barang industri seperti barang-barang besi, perkakas pertanian, obat-obatan dan lain-lain. Desa-desanya mengeluarkan beras, sayur-mayur, binatang ternak, susu, dan lain-lain. Barang-barang kota yang berlebih, yakni barang itu dipandang penduduk kota sebagai keperluan hidupnya ditukarkan dengan barang-barang desa yang berlebih itu (Malaka, 2000c).

Bagi Tan Malaka produksi dan konsumsi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Produksi yang dihasilkan haruslah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan Rakyat Indonesia. Apabila rakyat sudah merasakan hasil produksi tersebut dan hasilnya masih berlebihan, baru kemudian produksi yang dihasilkan tersebut dijual ke luar negeri. Tan Malaka pun tidak melarang barang-barang produksi atau alat-alat produksi yang biayanya lebih murah di luar negeri dibeli dengan tujuan memberi kemudahan dan kelancaran produksi di Indonesia (Malaka, 2005).

Keseimbangan dalam sebuah produksi perlu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak memproduksi suatu barang secara brutal dan besar-besaran sehingga berdampak pada turunnya harga barang oleh persaingan perusahaan-perusahaan produksi. Akibat terburuk yang terjadi dari pesaing ini adalah bagi yang kalah, perusahaan mereka akan menjadi bangkrut dan akan menimbulkan pengangguran besar-besaran. Dengan terjadinya pengangguran, maka para buruh yang menganggur tadi tidak mampu lagi untuk membeli barang-barang dan kebutuhan pokok. Hal ini pernah terjadi di Negara Amerika, kaum kapitalis membuang kelebihan barang-barang berupa gandum ke dasar laut untuk mengendalikan perekonomian, padahal rakyat miskin masih banyak membutuhkannya. Produksi brutal ini dinamakan oleh Tan Malaka dengan “Produksi Anarkis.” (Malaka, 2005)

Kemudian dari sisi peningkatan hasil produksi dalam konteks negara, Tan Malaka juga menawarkan konsep rencana ekonomi terhadap negara Indonesia dengan tujuan untuk

menciptakan kemakmuran dan ketentraman. Oleh sebab itu, dalam hal kemajuan ekonomi Indonesia, pemberdayaan alat-alat produksi harus diutamakan oleh negara. (Malaka, 2005).” Tan Malaka berpendapat bahwa yang menjadi prioritas utama dari produksi menurut Tan Malaka adalah pengadaan alat-alat produksi dan industri besar dan pendirian pusat perindustrian sebagai sentral perekonomian negara. Karena dengan adanya prioritas utama tersebut, Indonesia dalam gagasan Tan Malaka akan mampu menjadi Negara yang mandiri tanpa ada campur tangan dari negara asing.

Adapun produk yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang menjadi prioritas utama menurut Tan Malaka adalah industri yang menjadi kebutuhan pokok sebuah masyarakat. “Agar kita memiliki sedikit pandangan tentang rencana ekonomi, ada baiknya disebutkan industri yang utama yang disusun sebagai berikut: Pabrik buat bangunan rumah, gedung, jembatan dan lain-lain. Pabrik buat perhiasan rumah, tikar, cat dinding, dan sebagainya, jam, makanan, minuman, dan sebagainya, pabrik buat kain, benang, pencilun dan sebagainya. Pabrik buat pengangkutan, kereta, oto, kapal air dan udara, baja, besi, dan lain-lain. Pabrik obat-obatan dan lain-lain. Tidak lupa pula pabrik the, kina, kopi, gula, karet dan lain-lain (Malaka, 2005).”

Dari pesan di atas, Tan Malaka hendak menyampaikan pentingnya perusahaan produksi yang sifatnya menyediakan kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang yang bercita-cita untuk memakmurkan dan melepaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, kemelaratan dan penindasan, Tan Malaka meyakini bahwa prinsip sosialis yang diterapkannya dari ajaran marxis merupakan sebuah jalan menuju keadilan dan kemakmuran yang mutlak. Berdasarkan pembacaan penulis terhadap gagasan-gagasan Tan Malaka, ada beberapa faktor-faktor produksi yang dibahas oleh Tan Malaka guna menuju ke arah konsumsi yang stabil agar perekonomian bisa berkembang dan maju, yaitu:

a. Sumber Daya Alam (Tanah dan Mineral lainnya) dan Modal (Alat- alat Produksi) beserta Pengelolaan dan Kepemilikannya

Indonesia dalam pandangan Tan Malaka merupakan daerah yang kaya dengan sumber produksi alamnya. Sehingga dengan modal alam itu, jika Indonesia dikelola dengan sistem produksi yang seimbang, dan untuk memenuhi konsumsi yang seimbang, baik di dalam maupun diluar negeri, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting yang harus dilakukan dalam rangka rencana ekonomi sosialis adalah dengan melakukan penataan aset, harta kepemilikan, dan sumber-sumber produksi yang ada ditangan masyarakat. Meskipun Tan Malaka adalah seorang marxis dan menghendaki sebuah tatanan negara yang diperintah atas dasar-dasar proletariat (*Murba/Mustad'afin*), namun melihat kondisi objektif Indonesia, ia membuat penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Bagi Tan Malaka, ketika kemerdekaan sudah dicapai 100%, dalam arti bahwa imperialisme tidak lagi bercokol secara politik dan ekonomi di Indonesia, yang perlu dilakukan segera adalah penataan aset secara adil bagi masyarakat agar sifat kemodalan tidak kembali dari campur tangan terhadap sistem produksi dan kepemilikan. Namun Tan Malaka memperingatkan agar masyarakat tidak langsung berada di bawah diktator proletariat (Malaka, 1962).

Pertimbangan utama dalam gagasan Tan Malaka adalah bahwa rakyat Indonesia sebagian besar masih terikat dengan tanah, oleh sebab itu yang terpenting dalam pembagian aset dan sumber produksi adalah penataan dan pembagian tanah. Untuk menjalankan program tersebut, Tan Malaka terlebih dahulu membedakan rakyat Indonesia yang melakukan produksi yang berbasis tanah ke dalam beberapa golongan, yaitu (Nasbi, 2004): pertama, proletar Tanah. Proletar tanah adalah penduduk yang sama sekali tidak memiliki tanah dan hidup hanya dengan mengandalkan upah sebagai buruh tani. Kedua, petani setengah proletar tanah. Golongan ini adalah rakyat yang mendapatkan sebagian pemenuhan hidupnya dari upah sebagai buruh tani, dan sebagian lainnya dari hasil lain (sawah sendiri, pertukaran dan lain-lain. Ketiga, petani kecil. Mereka cukup punya tanah sekedar untuk kebutuhan keluarganya atau sekitar 2,5 hektar. Dalam proses produksi mereka masih menggarapnya bersama anggota keluarga sendiri. Keempat petani

sedang. Orang yang memiliki tanah sekitar 3-5 hektar. Meskipun telah menggunakan jasa buruh tani sebanyak dua atau tiga orang, namun sipemilik tanah masih ikut bekerja menggarap tanahnya. Kelima, petani sedang-besar. Mereka adalah golongan berada diantara petani sedang dengan tuan tanah/raja. Golongan ini masih ikut bekerja sebagai petani dan adat serta kebiasaannya masih sama dengan petani di sekitarnya. Sawah ladangnya belum digarap dengan mesin dan tidak terjadi pemusatan tenaga kerja di kebun atau sawahnya. Keenam, tuan tanah/tuan kebun. Golongan ini adalah golongan yang tidak bekerja dan hidup semata-mata dari hasil keringat orang lain. Pertaniannya sudah moderen dari segi penggunaan mesin berat dan sudah terjadi pemusatan tenaga kerja di lahannya.

Perlakuan terhadap masing-masing tingkatan petani tersebut tidaklah sama. Hak milik perorangan masih tetap harus dihormati karena pak tani tersebut masih sangat kuat terikat dengan tanahnya serta adat dan kebiasaan yang kolot. Hanya saja langkah awal revolusi memang perlu dilakukan dengan menyelenggarakan pembagian tanah. Setiap petani berhak mendapatkan tanah seluas yang dimiliki petani sedang (3-5 hektar) dan itu dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bagi orang yang memiliki tanah lebih dari itu. Kelebihannya harus diserahkan kepada negara untuk didistribusikan dengan adil. Bagi tuan tanah dan kaum ningrat yang iklas maka kelebihan tanah mereka yang diambil tersebut akan diberikan ganti rugi, namun bagi yang melawan akan dilakukan penyitaan secara paksa tanpa ganti rugi (Nasbi, 2004).

Berdasarkan teori marxis yang dipahami Tan Malaka, seharusnya tidak boleh ada kepemilikan alat produksi secara pribadi seperti kepemilikan tanah. Namun karena petani belum siap, mereka belum akan bisa meninggalkan cara dan adat lama lalu berpindah kepada tata kehidupan baru secara drastis. Tan Malaka berujar bahwa masih terlalu pagi bagi pak tani untuk menyaksikan kebahagiaan yang dapat dimunculkan oleh sistem sosialisme. Nanti suatu saat ketika mereka melihat manfaat kepemilikan kolektif dan diatur dengan perencanaan produksi oleh negara, mereka dengan suka rela akan menyerahkan diri di bawah pimpinan sosialis (Nasbi, 2004).

Diluar golongan petani juga perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Kaum borjuasi, pedagang, dan pengusaha kecil harus dibiarkan memiliki usahanya. Dalam fikiran Tan Malaka, lama-kelamaan para para borjuis kecil tersebut akan sadar akan manfaat dan kemakmuran perencanaan produksi oleh negara, sehingga mereka akan menyerahkan usaha mereka kepada negara.

“kaum proletar Indonesia tidak boleh menganggap kaum yang bukan proletar sebagai lawan. Kerja sama antara keduanya sangat penting. Bahkan kaum tani, pedagang kecil, intelektual dan lain-lain, mereka pun harus mendapatkan pembagian ekonomi. Bahkan borjuis kecil juga masih harus dibiarkan untuk mengelola perusahaan kecil mereka. Lama-kelamaan dengan melihat kesejahteraan yang dimunculkan di bawah pimpinan komunis, mereka dengan suka rela akan menyerahkan semua perusahaan itu kepada negara (Malaka, 1962).

Menurut Tan Malaka, Aset yang disita dan dijadikan dalam pengawasan negara adalah perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki oleh para penjajah. Beliau menambahkan, bahwa hanya golongan kapitalis imperialislah yang memiliki industri dan perkebunan besar yang sebenarnya juga di rampas dan dirampok dari rakyat Indonesia sendiri. Dengan penataan aset tersebut, sebenarnya Tan Malaka telah merencanakan sebuah skenario ekonomi sosialis. Tan Malaka berharap masyarakat sedikit demi sedikit dapat diarahkan kepada sistem ekonomi dan produksi yang terencana di bawah kendali negara. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan penghisapan kapital oleh segelintir orang dan meniadakan anarkisme produksi. Namun disisi lain, penataan tersebut juga harus memperhatikan dan lebih mengutamakan persatuan masyarakat. Oleh karena itu, maka kepemilikan alat produksi secara pribadi dalam batasan tertentu masih tetap diakui, terutama tanah dan perdagangan kecil.

b. Tenaga Kerja

Layaknya seorang marxis, Tan Malaka tidak lupa memberikan perhatiannya terhadap kaum buruh di Indonesia. Menurut beliau, Karena penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis imperialis, kaum buruh Indonesia mengalami kemelaratan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Keadaan kaum buruh pun diperparah dengan kebodohan yang disengaja diciptakan, ketidakadilan, serta segala macam bentuk penindasan dan kezaliman yang membungkusinya.

“Jika kita mau tahu beberapa jumlah buruh industri, kebun-kebun dan pengangkutan, tentulah dengan jalan itu kita ketahui berapa banyaknya “budak belian kolonial” yang kelaparan di Indonesia sebab sebagian besar dari buruh industri itu miskin, sebab kepada perusahaan besar-besar itu, mereka harus menjual atau menyewa tanahnya, hingga akhirnya kehilangan tanah dan mata pencaharian. Perlakuan pengawasan-pengawasan kebun bangsa Eropa lebih tepat digambarkan sebagai penikaman, pembacokan, penganiayaan dan pembunuhan atas asisten-asisten kebun dan kehalusan yang diusik-usik hingga menjadi kekejaman”. “Kaum Buruh Industri, perkebunan dan pengangkutan yang beratus ribu atau beberapa juta di Jawa dan lainnya, yang diperbudak tidak dengan kontrak, yang katanya “Buruh Merdeka” bernasib tidak lebih baik daripada budak kontrak asli. Satu persatu kakinya diikat dengan rantai aturan hingga tidak dapat berorganisasi dan berjuang melawan kapitalis yang sewenang-wenang” (Malaka, 2000c). Tan Malaka juga menilai kalau sebenarnya upah yang diberikan oleh kaum kapitalis imperialis terhadap kaum buruh tidak mencukupi dengan kebutuhan hidup mereka. Keadaan tersebut diperparah dengan kenaikan harga yang tinggi sementara gaji tidak naik malah menurun. Bahkan, tenaga merekapun dikuras tiada hentinya (Malaka, 2000c).

Jadi, Menurut Tan Malaka, kemakmuran sebuah Negara bisa tercapai dengan memakmurkan rakyatnya yang tertindas dan memelihara mereka. “Dalam ekonomi yang betul-betul dijalankan buat kemakmuran (proletar/Mustad’adfin), sudahlah tentu “tenaga” itu mesti dipelihara baik-baik. Sebisa mungkin ditambah nilainya dengan menambah kodrat dan sifat-baiknya. Dipelihara makan dan minumannya si pekerja, dipelihara rumah dan kesehatannya serta di gembleng otak dan tenaganya. Dengan begitu tenaga itu naik banyak (*quantiteit*) dan sifatnya. Itulah yang memakmurkan Negara” (Malaka, 2005).

Oleh karena itu, Tan Malaka mencoba membuat rencana ekonomi agar buruh di Indonesia mendapat penghasilan yang layak dan adil. Menurut Tan Malaka, nasib buruh di Indonesia dapat diperbaiki dengan jalan menaikkan gaji para buruh yang sepadan dengan memperhatikan harga barang sehari-hari (Malaka, 2000c). Selain itu, tenaga kerja menurut Tan Malaka idealnya bekerja maksimal 8 jam sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu yang berlebih untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Tan Malaka menambahkan kalau para pekerja dipaksa terus menerus untuk bekerja tidak tertutup kemungkinan tenaga dan kesehatan mereka akan semakin berkurang dan berdampak buruk terhadap produksi yang dihasilkan.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa tenaga kerja menurut Tan Malaka bukanlah seorang budak atau mesin yang tenaganya harus dikuras habis. Maka yang langkah yang ditempuh oleh Tan Malaka adalah bagaimana menyejahterakan buruh dengan membagi waktu dan upahnya sesuai dengan kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya.

2. Konsep Produksi Menurut Ekonomi Islam

Produksi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *production* yang berarti penghasilan (Echols, 1996). Sedangkan secara terminologi produksi diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas barang-barang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia (Wirasmita, 2002). Sementara itu dalam literatur ekonomi Islam, etimologi produksi dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-intaj*” dari akar kata *nataja* yang secara harfiah dimaknai dengan (mewujudkan atau mengadakan sesuatu). Sedangkan secara terminologi, ekonom muslim cenderung memiliki pendapat yang beragam. Ibnu Khaldun memandang produksi

sebagai pencurahan tenaga untuk memproduksi sesuatu (barang atau jasa) yang dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat (Khalidun, t.th). sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, produksi merupakan penambahan nilai guna atas suatu barang yang berorientasi kepada kemaslahatan, dimana kemaslahatan itu terwujud dengan memelihara maqashid syariah (Al-Syatibi, t.th).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang orientasinya lebih kepada meningkatkan utilitas suatu barang sehingga memberikan manfaat terhadap manusia. Adapun prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang harus dijalankan dan dipatuhi, yaitu (Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, 2016):

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Kemanusiaan
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip kebajikan (*kemaslahatan*)
- e. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) dan tanggung jawab (*al-fardh*)

Selanjutnya faktor-faktor produksi menurut ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting, termasuk semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi (Muhammad, 2004).

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tak terhingga, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan (Rahman, 1995). Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi siapapun yang mempekerjakan orang lain untuk menbayarkan upahnya.

Syari'at Islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja (*employee*) dan kewajiban bagi pengusaha (*employer*). Pada pasar persaingan sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi al-'amal*), dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar. Namun Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral atau kemanusiaan mengharuskan adanya pertimbangan meliputi nilai kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selain menjadikan *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga menggariskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak (Waliam, 2017).

c. Modal

Modal merupakan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan kekayaan lagi. Jadi modal adalah *capital is produced by the expenditure of labour and the use of natural resources* (Mannan, 1980). Bahwa modal dihasilkan oleh tenaga kerja dan merupakan penggunaan/pemanfaatan dari sumber daya alam. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa modal merupakan sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok. Kedudukan modal dalam faktor produksi adalah sebagai sarana untuk

mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum.

3. Analisis Konsep Produksi Tan Malaka menurut Perspektif Ekonomi Islam

Gagasan Tan Malaka tentang konsep produksi banyak diilhami dari pemikiran Karl Marx. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, bahwa Tan Malaka semasa belajar di Belanda telah banyak membaca buku-buku kiri, sehingga membentuk pengetahuan dari Tan Malaka. Berikut pemikiran Tan Malaka beserta analisisnya dalam perspektif ekonomi Islam:

- a. Menurut Tan Malaka keseimbangan dalam sebuah produksi perlu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak memproduksi suatu barang secara brutal dan besar-besaran (produksi anarki) sehingga berdampak pada turunnya harga barang oleh persaingan perusahaan-perusahaan produksi. Akibat terburuk dari persaingan produksi ini adalah perusahaan yang kalah, perusahaan mereka akan menjadi bangkrut dan akan menimbulkan pengangguran besar-besaran. Dengan terjadinya pengangguran, maka para buruh yang menganggur tadi tidak mampu lagi untuk membeli barang-barang dan kebutuhan pokok. Secara tersirat Tan Malaka ingin menegaskan bahwa kegiatan produksi harus menciptakan kemaslahatan. Di dalam Islam, prinsip dalam melakukan produksi adalah mewujudkan kemaslahatan bagi hidup manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Jadi pola produksi yang anarkis sebagaimana disebutkan Tan Malaka di atas adalah produksi yang tidak mencerminkan kemaslahatan.
- b. Tan Malaka menawarkan sebuah konsep rencana ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran, ketentraman dan kemandirian ekonomi. Tan Malaka memprioritaskan pengadaan alat-alat produksi dan industri besar dan pendirian pusat perindustrian sebagai sentral perekonomian negara. Karena dengan adanya prioritas tersebut, Indonesia dalam gagasan Tan Malaka akan mampu menjadi Negara yang mandiri tanpa ada campur tangan dari negara asing. Adapun produk yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang menjadi prioritas utama menurut Tan Malaka adalah industri yang menjadi kebutuhan pokok sebuah masyarakat. Gagasan ini senada dengan tujuan produksi dalam Islam, bahwa kegiatan produksi untuk menciptakan kemakmuran dan kemandirian ekonomi. Umar bin Khattab dalam buku Jaribah (2006) mengatakan produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban suatu bangsa tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi.
- c. Penataan faktor produksi dalam hal ini tanah sebagai sebuah aset produksi. Penataan ini dilakukan secara adil bagi masyarakat agar sifat kemodalan tidak kembali dari campur tangan terhadap sistem produksi dan kepemilikan. Langkah yang ditempuh oleh Tan Malaka dalam penataan ini adalah pembagian aset dan sumber produksi. Berdasarkan teori marxis yang dipahami Tan Malaka, seharusnya tidak boleh ada kepemilikan alat produksi secara pribadi seperti kepemilikan tanah. Secara bertahap Tan Malaka ingin menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Di dalam Islam konsep kepemilikan secara pribadi terhadap alat-alat produksi dibolehkan. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengupayakan sesuatu untuk menjadi hak milik pribadinya, selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya (Sodiqin, 2007). Pembatasan dalam hal pemilikan individu terletak pada fungsionalisasinya. Islam memberikan sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk memikirkan komunitas

masyarakat sekitarnya. Kewajiban-kewajiban bagi pemilik kekayaan tersebut antara lain: zakat, sadaqah, infak, wakaf, wasiat dan sebagainya (Mahfuz, 1994).

- d. Tan Malaka dalam gagasan tentang pemberian upah kepada tenaga kerja mengedepankan prinsip keadilan. Tenaga kerja menurut Tan Malaka bukanlah seorang budak atau mesin yang tenaganya harus dikuras habis. Maka yang harus dilakukan oleh Tan Malaka adalah bagaimana menyejahterakan buruh dengan membagi waktu dan upahnya sesuai dengan kesejahteraan dan kemakmuran hidup tenaga kerja. Di dalam Syari'at Islam upah dipandang sebagai hak dari orang yang telah bekerja (*employee*) dan kewajiban bagi pengusaha (*employer*). Pada pasar persaingan sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi al-'amal*), dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil diharuskan melihat tingkat upah pasar. Di sisi lain Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi moralitas atau humanisme mengharuskan adanya pertimbangan meliputi nilai kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selain menjadikan *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga menggariskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak (Waliam, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan Tan Malaka tentang pentingnya keseimbangan produksi dan konsumsi sehingga menghindarkan diri dari produksi anarki telah sesuai dengan prinsip produksi di dalam ekonomi Islam. Dimana produksi yang dilakukan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Kemudian Peningkatan produksi guna untuk menciptakan kemakmuran dan kemandirian ekonomi sebuah negara yang diusung oleh Tan Malaka dalam gagasannya senada dengan konsep produksi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Karena, produksi dalam ekonomi Islam sejatinya menciptakan kemakmuran dan kemandirian ekonomi sebuah negara. Karena bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain.

Dari sisi penataan aset faktor produksi, Tan Malaka mencoba menghilangkan secara bertahap kepemilikan alat-alat produksi oleh individu. Hal ini tidak sejalan dengan konsep produksi ekonomi Islam, dimana kepemilikan individu dibolehkan selama kepemilikan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Tak lupa pula dalam hal konsep upah terhadap tenaga kerja yang ditawarkan oleh Tan Malaka sejalan dengan konsep upah dalam perspektif ekonomi Islam. Penekanan prinsip keadilan dalam menetapkan upah merupakan titik temu dari kedua konsep upah tersebut.

2. Saran

Harus diakui Tan Malaka memiliki pemikiran yang brilian dan berbobot. Namun bukan berarti pemikirannya harus diterima begitu saja tanpa ada analisis dan kritik mendalam dan mengena. Sebuah pemikiran tidak akan menjadi bernilai jika dilalui tanpa ada kritik dari pembaca maupun penggemarnya. Karena, jika pemikiran tersu hidup tanpa ada kritikan, maka tidak tertutup kemungkinan pemikiran tersebut akan menjadi dogma atau doktrin, dan tokohnya pun akan dikultuskan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Echols, J. M. dan H. S. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab* (Terjemahan). Jakarta

Timur: Khalifa.

- Khaldun, A. I. (n.d.). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahfuz, S. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Malaka, T. 1962. *Menuju Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafi Jakarta.
- Malaka, T. 2000a. *Dari Penjara ke Penjara Jilid I*. Jakarta: Teplok Press.
- Malaka, T. 2000b. *Islam dalam Tinjauan MADILOG*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Malaka, T. 2000c. *Massa Aksi*. Jakarta: Teplok Press.
- Malaka, T. 2005. *Rencana Ekonomi Berjuang*. Serpong: Margin Kiri.
- Mannan, M. . 1980. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyati.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Nasbi, H. 2004. *Filosofi Negara menurut Tan Malaka*. Jakarta: LPPM Tan Malaka.
- Poeze, H. A. 2000. *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925*. Jakarta: Pustaka Utama Grafity.
- Rahman, A. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sodiqin, A. 2007. *HUKUM AGRARIA DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQH * Ali Sodiqin*. (06).
- Waliam, A. 2017. Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal STIE Bank BPD Jateng*, 5(2), 265–292.
- Wirasasmita, H. R. 2002. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: Pionir Jaya.